



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERI CAHYADI
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 192226

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.075.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , LAINNYA Rp. 1.530.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.130.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.285.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/207 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	549.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	153.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	351.577.246
F. HARTA LAINNYA	Rp.	148.000.000
Sub Total	Rp.	6.277.077.246



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.277.077.246

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.